

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING DI PROVINSI JAWA BARAT (Studi Kasus di Pemerintah Kota Depok)

Epi Ardini¹, Wirman Syafri², Marja Sinurat³, Layla Kurniawati⁴, Ahmad Averus⁵
epiardini@gmail.com¹, wirmansyafri@gmail.com², dr.marjasinurat@yahoo.com³,
laylakurniawati@ipdn.ac.id⁴, ahmadaverus@ipdn.ac.id⁵

IPDN

ABSTRAK

Stunting menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius ditangani oleh pemerintahan kota Depok, dengan dikeluarkannya Perwali kota Depok No.99 tentang percepatan penurunan stunting di kota Depok dan juga kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang berlandaskan kepada kebijakan Per BKKBN No.12 tahun 2021 tentang RANPASTI di Kota Depok bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di kota Depok. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang salah satunya bertujuan untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting sampai mencapai angka 14% pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deksriptif, dengan tujuan menyajikan gambaran lengkap terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Hamdi (2014). Implementasi kebijakan meliputi dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi. Pengumpulan data dengan wawancara dengan melibatkan 18 informan yang merupakan informan kunci dalam penanganan stunting di kota Depok. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan prevalensi stunting di kota Depok ini menurut implementasi kebijakan Hamdi dalam dimensi produktivitas sudah berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan pencapaian target kelompok sasaran pada tahun 2023 sebesar 2,43% dengan jumlah balita 2512 balita. Berdasarkan nilai batas untuk kesehatan masyarakat menurut WHO (2019) prevalensi balita wasting di kota Depok yaitu 2,43% dan ini termasuk kategori sangat rendah. Hasil tersebut telah melebihi dari target RJPMD kota Depok 2024 sebesar 7%. Kemudian dari dimensi linieritas yang dilihat dari prosedur, waktu, biaya, tempat dan para petugas pelaksana program penurunan stunting di kota Depok telah sesuai, begitupun dengan dimensi efisiensi implementasi kebijakan penurunan stunting di kota Depok yang dilihat dari asset, dana dan teknologi telah sesuai dengan Perwali kota Depok No.99 tentang percepatan penurunan stunting di kota Depok. Para pelaksana program adalah TPPS kota Depok dan TPK kota Depok yang memiliki peran penting di kota Depok. Determinan implementasi kebijakan penurunan stunting di kota Depok yaitu sumber daya, partisipasi kelompok sasaran, substansi kebijakan, perilaku pelaksana dan interaksi jejaring kerja. Berdasarkan hasil penelitian melihat perlunya menambahkan satu indikator sebagai pelengkap dalam teori Hamdi pada dimensi konteks berupa kolaborasi pemerintahan dengan keterlibatan swasta dan sukarelawan *Government*. Dalam hal ini kolaborasi merupakan salah satu kunci keberhasilan percepatan penurunan prevalensi stunting di kota Depok.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting Kota Depok, Depok Zero Stunting, Implementasi Kebijakan Hamdi.

ABSTRACT

Stunting is one of the most serious problems handled by the Depok city government, with the issuance of the Depok City Mayor's Decree No. 99 concerning the acceleration of stunting reduction in the city of Depok and also the policy for the Acceleration of Stunting Reduction in the City of Depok, West Java Province which is based on the policy of Per BKKBN No. 12 2021 regarding

RANPASTI in Depok City aims to accelerate the reduction in stunting prevalence in Depok city. This is also in line with the policy issued by President Joko Widodo, namely Presidential Regulation no. 72 of 2021 concerning Acceleration of Stunting Reduction, one of which aims to accelerate the reduction in stunting prevalence rates to reach 14% by 2024. The research method used is a descriptive qualitative approach, with the aim of presenting a complete picture of the problem being studied. This research uses policy implementation theory from Hamdi (2014). Policy implementation includes the dimensions of productivity, linearity and efficiency. Data were collected using interviews involving 18 informants who were key informants in handling stunting in the city of Depok. The results of this research state that the implementation of the policy to accelerate the reduction of stunting prevalence in the city of Depok according to Hamdi's policy implementation in the productivity dimension has been effective. This is proven by the achievement of the target group target in 2023 of 2.43% with a total of 2512 toddlers. Based on the limit value for public health according to WHO (2019), the prevalence of wasting under five in the city of Depok is 2.43% and this is in the very low category. These results have exceeded the 2024 Depok city RJPMD target of 7%. Then, from the linearity dimension seen from the procedures, time, costs, place and officers implementing the stunting reduction program in the city of Depok, it is in accordance, as well as the efficiency dimension of implementing the stunting reduction policy in the city of Depok, seen from assets, funds and technology, it is in accordance with the Perwali Depok city No.99 regarding the acceleration of stunting reduction in Depok city. The program implementers are the TPPS Depok city and the Depok city TPK which have an important role in the city of Depok. The determinants of implementing the stunting reduction policy in the city of Depok are resources, target group participation, policy substance, implementer behavior and network interactions. Based on the research results, we see the need to add an indicator as a complement to Hamdi's theory in the context dimension in the form of government collaboration with the involvement of the private sector and government volunteers. In this case, collaboration is one of the keys to success in accelerating the reduction of stunting prevalence in the city of Depok.

Keyword: Policy Implementation, Depok City Stunting, Depok Zero Stunting, Hamdi Policy Implementation.

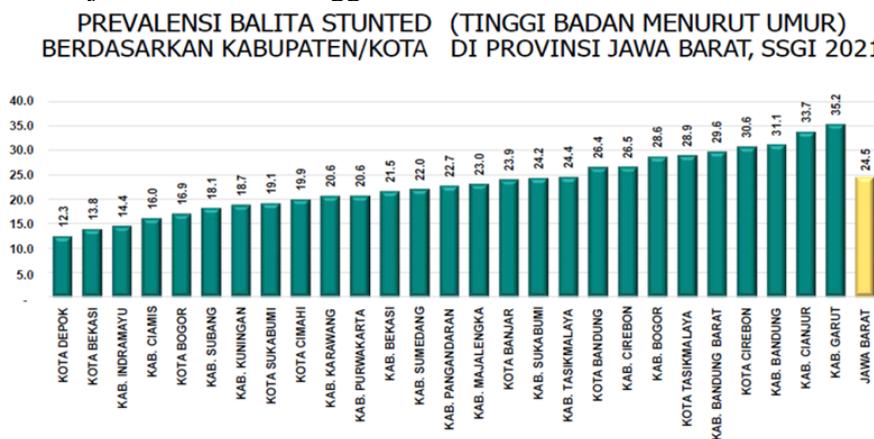
PENDAHULUAN

Dalam upaya penanganan stunting Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang salah satunya bertujuan untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting sampai mencapai angka 14% pada tahun 2024. Sebagai usaha mempercepat penurunan stunting melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari direksi dan manajemen senior. Wakil presiden adalah panitia pengarah utama, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan menteri-menteri lainnya. Ketua Pelaksana adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menjelaskan bahwa prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia menurut provinsi, Nusa Tenggara Timur memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, yakni 35,3%. Posisinya diikuti oleh Papua dan Nusa Tenggara Barat dengan prevalensi stunting sebesar 34,6% dan 32,7%. Sedangkan Aceh mencatatkan prevalensi stunting sebesar 31,2%. Lalu, angka stunting di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat berturut-turut sebesar 28,2% dan 27,8%. Prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 27,7%. Sedangkan Sulawesi Selatan memiliki prevalensi stunting sebanyak 27,2%. Bali mencatatkan prevalensi stunting paling rendah, yakni 8%. Di atasnya ada Riau dan Jambi dengan prevalensi stunting berturut-turut sebesar 17% dan 18%. Sementara data prevalensi di Jawa Barat sendiri sebesar 26,5%. Penilaian status gizi balita terkait erat juga

dengan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi anak. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan mengumpulkan data di 34 provinsi dan 514 kabupaten/Kota dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS) dan 153.228 balita.

Berdasarkan pada data bahwa sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. SSGI 2021 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tidak hanya memberikan gambaran status gizi balita saja tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator intervensi spesifik maupun intervensi sensitif baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota yang telah dilakukan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024.

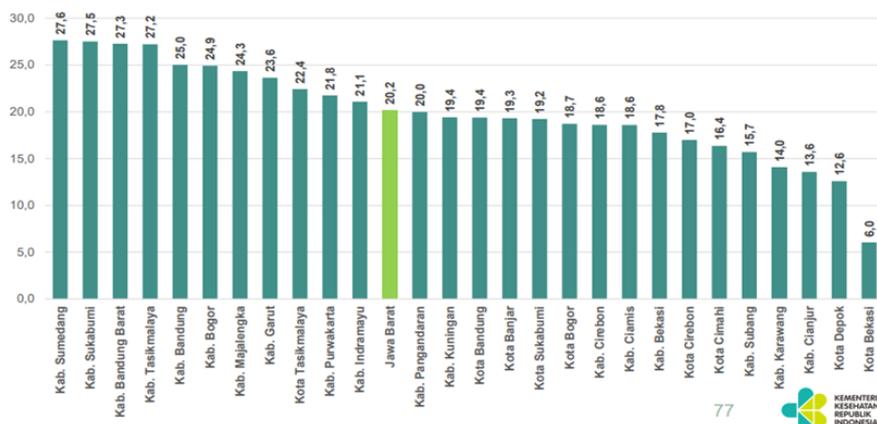


Gambar 1

Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur)
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SSGI 2021

Sumber: MATERI_KABKPK_SOS_SSGI

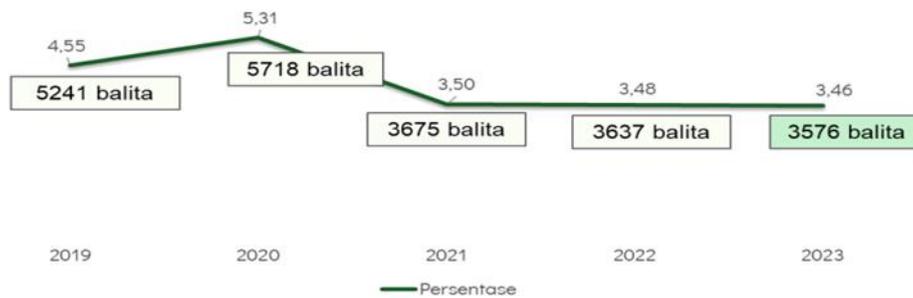
Grafik di atas menggambarkan angka prevalensi balita stunting di Jawa Barat pada tahun 2021, yang menunjukkan Kota Depok merupakan kota terendah (12,3) angka prevalensinya di Jawa Barat, lalu di tahun 2022, naik menjadi 12,6.



Gambar 2

Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur)
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SSGI 2022
Sumber: MATERI_KABKPK_SOS_SSGI

Status gizi buruk dapat diketahui dengan salah satu indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk. Kondisi gizi buruk tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, anak yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jumlah balita gizi buruk di Kota Depok tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuatif penurunan, yaitu sebanyak 64 orang balita pada tahun 2019, namun kembali meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 72 balita. Angka proporsi Status Gizi Stunting pada Balita di Kota Depok menunjukkan adanya penurunan mulai tahun 2019 yaitu 4,55 persen, kemudian meningkat pada tahun 2020 dengan angka 5,31 persen, dan kembali turun mulai dari tahun 2021 yaitu 3,50 persen, tahun 2022 dan tahun 2023 di angka 3,46 persen.

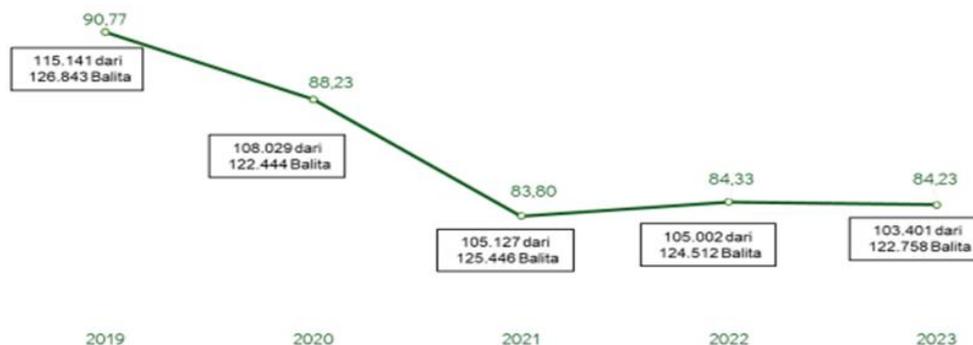


Gambar 3

Proporsi Status Gizi Stunting pada Balita di Kota Depok, 2019-2023

Sumber: RPKD kota Depok (2023)

Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting Kota Depok pada tahun 2022 yaitu sebesar 12,3%, yang merupakan nilai terkecil prevalensi balita stunting di Jawa Barat. Dimana angka prevalensi balita stunting provinsi Jawa Barat adalah 24,5%. Angka prevalensi stunting Kota Depok lebih rendah dibandingkan dengan target prevalensi stunting nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 dari 90,77 menjadi 88,23 di tahun 2020. Kemudian turun lagi pada tahun 2021 menjadi 83,80 dan terjadi kenaikan sedikit pada tahun 2022 menjadi 84,33 dan tahun 2023 menjadi 84,23. Terjadinya peningkatan angka penurunan prevalensi stunting di kota Depok ini, menurut Hamdi dapat dijadikan indikator pada produktivitas dalam implementasi kebijakan Peraruan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok.

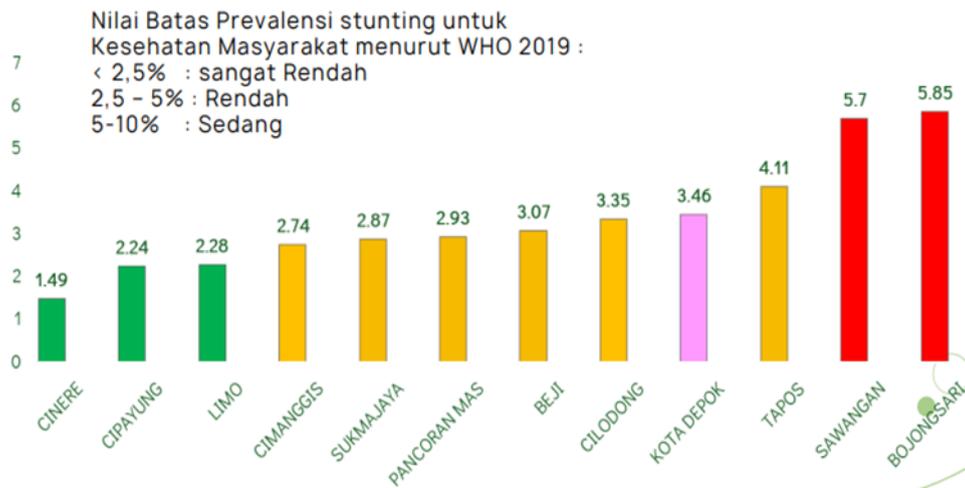


Gambar 4

Prevalensi Balita Stunting Kota Depok Provinsi Jawa Barat, SSGI 2023

Sumber: RPKD kota Depok (2022)

Berdasarkan pada RJPMD kota Depok tahun 2021-2026 dimana kondisi stunting di kota Depok dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Presentase stunting tahun 2017 adalah 5.97%, 2018 sebesar 5.41%, tahun 2019 sebesar 4.55% pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5.91%. Capaian pada tahun 2021 sebesar 3.60% dan tahun 2022 sebesar 3.48% (3.637 balita). Kemudian dalam RPJMD kota Depok dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dimana pencapaian Indikator kinerja presentase stunting bukan merupakan indikator kinerja utama pada tahun 2021 capaian yang diperoleh adalah 3.50% dan pada tahun 2022 kinerja capaian 127.58% dengan presentase balita stunting 3.48%.



Gambar 5

Prevalensi Stunting (Tinggi Badan) pada kegiatan BPB Agustus per Kecamatan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, SSGI 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok

Berdasarkan hal tersebut di atas, Mohammad Idris selaku Wali Kota Depok mendapatkan penghargaan atas peran dan kontribusinya dalam program penurunan stunting dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, karena sudah melampaui target prevalensi stunting nasional. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut sebagai cerminan dari indikator interaksi jejaring kerja menurut Hamdi, dimana para petugas pelaksana memiliki motivasi yang tinggi dalam implementasi kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok.

Penyebab stunting dapat diakibatkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Ketidacukupan gizi merupakan salah satu faktor penyebab stunting yang juga dapat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga. Meskipun penyebab terjadinya risiko stunting adalah multifaktorial, namun penyebab paling utama adalah kekurangan gizi kronis pada awal 1.000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat berupa kurangnya jumlah asupan makanan, atau kualitas makanan yang kurang baik seperti kurangnya variasi makanan. Kurangnya asupan gizi mulai dari calon ibu ketika masih remaja, saat menikah kemudian hamil, juga serta pada bayi dan balita yang diasuhnya yang berujung pada pertumbuhan yang mengalami hambatan.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara dengan informan berjumlah 18 responden. Studi pustaka dan observasi di

lapangan.

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih *person* yang benar-benar melakukan dan menguasai dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan koordinasi implementasi kebijakan penurunan stunting di kota Depok. Sebagai Informan utama adalah Walikota Depok, Wakil Walikota Depok, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala DP3AP2KB, Ketua TP PKK, Lurah di Kecamatan Pancoran Mas, dan di kecamatan Tapos serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) kota Depok juga Keluarga Beresiko Stunting di kota Depok.

Adapun analisis yang digunakan dari tulisan ini yaitu analisis deskriptif. (Deskripsi berarti menggambarkan ulang pemahaman yang didapat agar mendapat bahan untuk menulis (*writing*) dan menulis kembali (*rewriting*) yang pada prosesnya memuat aktivitas seperti; *reflecting*, *recognizing*, *rethinking* dan *revising*. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), *data display* (display data), dan *conclusion drawing*, *verification* (penarikan kesimpulan/ verifikasi). Penjelasan mengenai tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi data)

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data *Display* (Penyajian data)

Yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau verifikasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok

Konsep produktivitas yang dipakai untuk menganalisis sebuah kebijakan itu produktif atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan konsep Muchlis Hamdi¹ yang mengemukakan bahwa produktivitas berkaitan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama menyangkut pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Lebih lanjut Hamdi menggambarkan bahwa semakin lancar pemenuhan capaian kelompok sasaran, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut semakin produktif.²

Terkait implementasi kebijakan Peraturan walikota Depok No 99 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Depok, kelompok sasaran yang dimaksud adalah penerima manfaat program dalam kebijakan ini yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Namun dalam hal ini yang menjadi fokus utamanya adalah penurunan angka prevalensi stunting di kota Depok untuk menuju “Depok Zero Stunting.” Kemudian menurunkan jumlah anak stunting yang berhasil dicegah, agar tidak bertambah setiap tahunnya atau dikenal dengan istilah “Depok

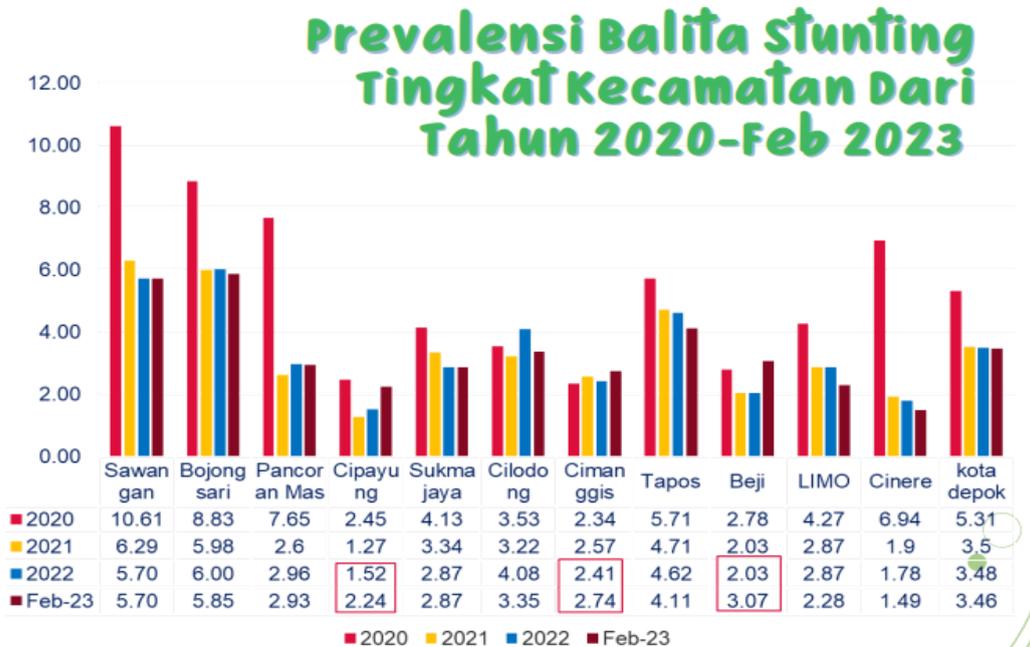
¹ Muchlis Hamdi, 2014: “Kebijakan Publik – Proses, Analisis, dan Partisipasi”, Ghalia Indonesia. Bogor. Hal. 105

² *Ibid*, hal. 105.

New Zero Stunting.”

a. Penurunan angka prevalensi stunting di Kota Depok

Adapun pencapaian penurunan angka prevalensi balita stunting di Kota Depok dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 mengalami penurunan, ini berdasarkan data e-PPGBM (pemerintah daerah), yaitu 3,48 persen dan masuk dalam kategori rendah. Data tersebut di atas, dapat terlihat dalam gambar di bawah ini:



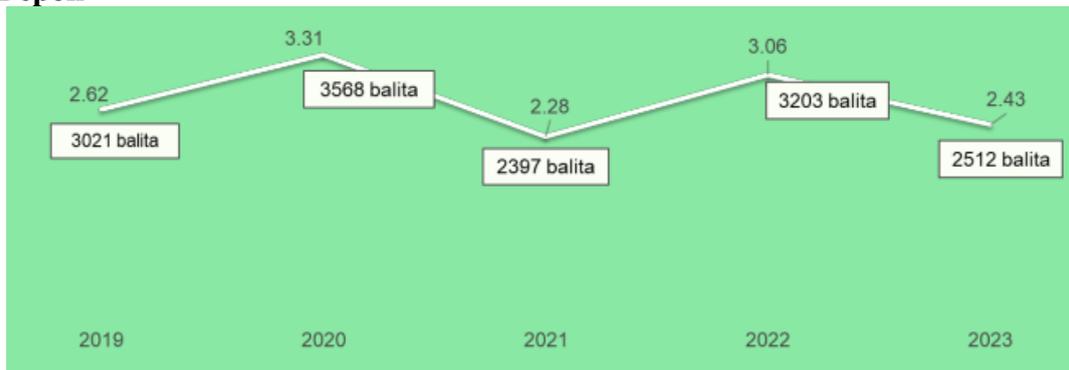
Gambar 6 Prevalensi Balita Stunting Tingkat Kecamatan pada tahun 2020-2023

Sumber: e-ppgbm 2023

Berdasarkan pada gambar di atas, maka penurunan angka prevalensi balita stunting di Kota Depok dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan angka stunting yang signifikan. Hal ini terlihat dimana pada tahun 2020 mencapai 5,31%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,5%. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 3,48% dan 3,46% pada tahun 2023. Pencapaian penurunan prevalensi balita stunting di Kota Depok ini tahun 2023 sebesar 3,46% ini sudah melebihi dari target RPJMD kota Depok periode 2021-2026 yaitu sebesar 4,75% dan RPJMN kota Depok sebesar 14%. Hal tersebut di atas, merupakan suatu pencapaian produktivitas yang termasuk baik, karena telah melebihi target pencapaian penurunan stunting yang sudah ditetapkan. Kemudian berdasarkan nilai batas untuk kesehatan masyarakat menurut WHO (2019), prevalensi balita stunting di Kota Depok tahun 2023 (3,46%) termasuk dalam kategori rendah.

Sementara itu beberapa kecamatan di kota Depok yaitu kecamatan Cipayung dengan angka prevalensi 1,52% pada tahun 2022, mengalami peningkatan menjadi 2,24%. Begitupun untuk kecamatan Cimanggis dan Beji, masing-masing prevalensi balita stunting mengalami peningkatan juga yaitu 2,74% yang awalnya 2,41% di tahun 2023. Sedangkan di kecamatan Beji peningkatan prevalensi dari angka 2,03% menjadi 3,07%. Walaupun terjadi peningkatan pada beberapa kecamatan tersebut di atas, tetap menjadikan angka prevalensi kota Depok masih termasuk kategori rendah berdasarkan kategori WHO (2019).

b. Adanya peningkatan angka proporsi Status Gizi Stunting pada Balita di Kota Depok



Gambar.7 Grafik prevalensi Balita wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) berdasarkan jumlah Balita yang diukur tinggi dan berat badan Balita tahun 2019-2023.

Sumber: e-ppgbm di unduh 10 Okt 2023

Berdasarkan data pada gambar di atas pada tahun 2019, terdapat 3.021 balita stunting yang terjadi pada balita di Kota Depok. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi peningkatan balita stunting sebanyak 3,31 atau terdapat sebanyak 3568 balita stunting di Kota Depok. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,28 dengan jumlah balita 2397 balita. Sementara itu pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 3.06 dengan jumlah balita 3203 balita, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 2,43% dengan jumlah balita 2512 balita. Berbagai upaya pun dilakukan dan dimasifkan dengan memaksimalkan program penurunan kasus stunting di Kota Depok. Berdasarkan nilai batas untuk kesehatan masyarakat menurut WHO (2019) prevalensi balita wasting di kota Depok yaitu 2,43%. sehingga termasuk kategori sangat rendah. Hasil tersebut telah melebihi dari target RJPM kota Depok 2024 adalah 7%.

Berdasarkan uraian dan pemaparan hasil penelitian dan wawancara dengan para informan di lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada dimensi produktivitas untuk implementasi kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Depok, telah tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah tercapainya target penurunan angka prevalensi stunting di kota Depok dan kedua dengan adanya peningkatan angka proporsi status gizi stunting pada balita di Kota Depok atau menurunnya jumlah balita stunting di kota Depok. Berdasarkan pencapaian target prevalensi stunting kota Depok pada tahun 2023 yaitu 2,43% telah melebihi target RJPM periode 2021-2024 sebesar 7%. Hal ini menunjukkan produktivitas dari implementasi kebijakan program telah berjalan dengan baik.

Linearitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penurunan angka prevalensi stunting di kota Depok pada dimensi linearitas pada indikator kesesuaian terhadap (prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana) **sudah sesuai dilaksanakan** dan sesuai juga dengan Perwali kota Depok No.99 tentang percepatan penurunan stunting di kota Depok dan adanya kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang berlandaskan kepada kebijakan Per BKKBN No.12 tahun 2021 tentang RANPASTI di Kota Depok bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di kota Depok. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Ketika semakin sesuai proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa

implementasi kebijakan tersebut semakin linear. Sebagaimana hasil penelitian ini, memiliki prosedurnya sudah sesuai, waktunya juga sudah tepat, kemudian menggunakan anggaran biaya dari APBN dan APBD kota Depok dan juga para pelaksana program yaitu TPPS dan TPK kota Depok telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Efisiensi

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti menunjukkan bahwa efisiensi pendayagunaan pelaksana, aset, dana dan teknologi dalam implementasi percepatan penurunan stunting di kota Depok telah sesuai dengan desain ataupun rancangan program yang tercantum dalam Perwali kota Depok No.99 tentang percepatan penurunan stunting di kota Depok. Sementara teknologi informasi yang dipergunakan dalam implementasi kebijakan penurunan percepatan stunting di kota Depok telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi e-PGBM dapat memudahkan pemerintahan kota Depok dalam memonitor dan memantau perkembangan percepatan penurunan prevalensi stunting yang lebih akurat dan bersifat realtime pada setiap periodenya. Selain itu juga dapat memonitor perkembangan balita stunting di setiap keluarganya. Adapun target yang dituju kota Depok adalah Depok Zero Stunting, maka dengan adanya e-pggbm ini sangat membantu pemerintah kota Depok dalam menekan penambahan balita stunting pada tahun 2024. Kesimpulannya dalam tingkat efisiensi pendayagunaan pelaksana, pendayagunaan aset, pendayagunaan dana dan penggunaan teknologi sejauh ini sangat efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam percepatan penurunan stunting di kota Depok.

B. Determinan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok

a. Subtansi Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi dan uraian wawancara dengan para informan, dan juga didasarkan kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 99 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka keselarasan isi kebijakan mengenai penurunan stunting di kota Depok ini selaras dengan kebijakan lainnya yang sudah berjalan sebelumnya. Kebijakan tersebut di antaranya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, juga kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Ais Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia, dan juga Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kemudian selaras juga dengan kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK) tahun 2013 dan kebijakan Permenkes No.25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Pada intinya kebijakan tersebut saling melengkapi demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan khususnya untuk tumbuh kembang anak balita dengan baik. Hal ini diperlukan agar terwujudnya generasi emas Indonesia pada tahun 2025.

b. Perilaku tugas Pelaksana

Berdasarkan hasil obsevasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa perilaku tugas pelaksana terkait dengan motivasi kerja pelaksana sudah berjalan dengan baik dan profesional, sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Perwali kota Depok No.99 tentang percepatan penurunan stunting di kota Depok. Hal terlihat dari sikap cepat tanggap para petugas pelaksana di lapangan. Ketika ada berita atau teidentifikasi balita stunting baru, maka Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Dokter Spesialis anak, Bidan, kader PKK dan Gizi akan terus memamtau dan meninjau peerkembangan balita stunting baru tersebut, sehingga dinyatakan statusnya masuk kepada kategori tidka stunting.

Walapun di lapangan pada awalnya terjadi penolakan dari keluarga beresiko stunting, karena mereka tidak mau anak balitanya disebut balita stunting. Dengan pendekatan dan penyampaian informasi demi kebaikan balita tersebut, akhirnya keluarga beresiko stunting terbuka dan mau menerima TPK untuk memantau dan memulihkan status anaknya mejadi tidak stunting.

c. Interaksi jejaringan kerja

Berdasarkan keterangan dan observasi menunjukkan bahwa interaksi jejaring kerja antar pelaksana dalam implementasi kebijakan penurunan percepatan stunting di kota Depok telah berjalan dengan baik. Interakasi jejaring kerja dalam implementasi kebijakan implementasi kebijakan penurunan percepatan stunting di kota Depok dapat terjalin dengan baik dan sukses melaksanakan wewenang serta tugas dan tanggung jawabnya. Semua ini selain karena komitmen dari Pimpinan Daerah yaitu Walikota Depok dan juga dukungan Badan Legislatif, serta ditunjang dengan faktor kepemimpinan yang baik juga pemilihan sumber daya manusia yang memiliki dedikasi yang baik juga profesional di bidangnya. Kemudian juga adanya tujuan dan target kerja yang jelas harus dicapai sesuai dengan dasar kebijakan Perwali kota Depok No.99 tentang Percepatan penurunan stunting di kota Depok. Pencapaian terget yang jelas sebagai output dari kebijakan tersebut hasil kerjasama para petugas pelaksana dalam implementasi kebijakan penurunan percepatan stunting di kota Depok, membuat tugas ini dapat terselesaikan dengan baik dan tercapainya target penurunan stunting melebihi target RJPMND kota Depok tahun 2021-2026.

d. Partisipasi kelompok sasaran

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di kota Depok determinan partisipasi kelompok sasaran yaitu masyarakat penerima manfaat program sudah berjalan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam relaitas di lapangannya ada saja kontribusi penerima manfaat disini seperti keluarga beresiko stunting, pada awalnya mereka menolak ataupun tidak mau apabila anaknya termasuk kategori stunting. Pada akhirnya mereka menjadi anti posyandu, tetapi dengan pendekatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) kota Depok yang terdapat di setiap kelurahan melakukan pendekatan dan komunikasi secara kekeluargaan dan bukan menghakimi. Pada akhirnya terbuka dan wawasan serta pengetahuan mereka juga terbuka mengenai stunting dan makanan bergizi buat anak balitanya yang stunting.

e. Sumber daya

Berdasarkan obervasi dan wawancara peneliti, bahwa implementasi kebijakan Per BKKBN No.12 tahun 2021 tentang RANPASTI di Kota Depok, yang dilandaskan kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 99 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting terkait determinan sumber daya yang terdiri dari ketercukupan dana, para pelaksana, ketersediaan informasi, dan ketepatan teknologi sudah memadai. Ketercukupan dana berasal dari APBD kota Depok, karena ini merupakan program nasional, maka ada juga dana dari APBN. Sedangkan untuk para pelaksana program selain dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selalu sigap dan cepat tanggap menangani keluarga beresiko stunting di kota Depok. Dalam ketercukupan informasi dimana informasi dan sosialisasi dilakukan secara terencana dengan melakuka penyuluhan di setiap kelurahan dan kecamatan di kota Depok. Selain itu juga ketersediaan informasi antara Pemerintah Kota Depok dengan Kecamatan atau Puskesmas dimana terdapat komunikasi dua arah dan terdapat timbal balik antara dua belah pihak komunikasi yang dilakukan baik dalam bentuk surat resmi (*feedback*) muapun dalam bentuk media online pada setiap kegiatan implementasi program gizi terhadap angka stunting yang yang akan dillaksanakan selalu dikoordinasikan secara bersama. Kemudian mengenai

sumber daya teknologi yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi masyarakat e-PPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) untuk memonitor dan memantau perkembangan balita stunting di kota Depok pada setiap periodenya secara *realtime*.

C. Konsep Model Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok

Model implementasi kebijakan penurunan stunting di kota Depok dalam penelitian ini dianalisa dengan berdasarkan teori kebijakan Hamdi yaitu produktivitas, linearitas dan efisiensi. Dimana dalam dimensi produktivitas implementasi kebijakan mengenai Percepatan Penurunan Stunting di kota Depok ini menurut data setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penurunan prevalensi stunting yang mana pada tahun 2023 ini mencapai 3,46% ini sudah melebihi dari target RPJMD kota Depok periode 2021-2026 yaitu sebesar 4,75% dan RPJMN kota Depok sebesar 14%. Hal ini membuktikan bahwa produktivitas implementasi kebijakan mengenai Percepatan Penurunan Stunting di kota Depok telah berjalan efektif, dengan produktivitas cukup tinggi. Sementara itu untuk dimensi linearitas dalam implementasi kebijakan mengenai Percepatan Penurunan Stunting di kota Depok, baik berdasarkan linearitas waktu, biaya, tempat, standar pelaksanaan dan prosedur telah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi dan berlandaskan kepada Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 99 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di kota Depok dan juga kepada kebijakan Per BKKBN No.12 tahun 2021 tentang RANPASTI di Kota Depok.

Kemudian dalam dimensi efisiensi merupakan perbandingan antara kegiatan dengan hasil yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas usahanya efisiensi dapat dijadikan sebagai parameter kinerja suatu lembaga ataupun organisasi. Dalam dimensi efisiensi ini, dimana indikator penilaiannya meliputi pendayagunaan pelaksana, pendagunaan asset, pendayagunaan dana, dan pendayagunaan teknologi. Halnya terkait Percepatan Penurunan Stunting di kota Depok yang berlandaskan juga kepada kebijakan Per BKKBN No.12 tahun 2021 tentang RANPASTI di Kota Depok, dimana dalam keempat indikator pendayagunaan pelaksana, asset, dana, dan teknologi yang digunakan dalam kebijakan tersebut di atas telah berjalan dengan efektif dan efisien. Dimana output yang dihasilkan dari kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di kota Depok dan juga kepada kebijakan Per BKKBN No.12 tahun 2021 tentang RANPASTI di Kota Depok ini sudah melebihi target RPJMD kota Depok periode 2021-2026 yaitu sebesar 4,75%.

Keterhubungan ketiga dimensi di atas, yakni produktivitas, linearitas dan efisiensi dipengaruhi determinan antara lainnya yaitu pertama, substansi kebijakan berkaitan dengan spesifikasi kebijakan dan keselarasan kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kedua, perilaku tugas pelaksana erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana. Ketiga, sumber daya meliputi ketersediaan sumber keuangan, sumber daya manusia sebagai pelaksana hingga ketersediaan teknologi dan informasi. Faktor sumber daya cukup penting dalam proses penyaluran kebijakan sampai kepada masyarakat. Keempat, interaksi jejaring kerja dapat diartikan sebagai komunikasi, hubungan maupun kerjasama antar pelaksana. Interaksi tersebut sangat penting, meskipun masing-masing pelaksana memiliki tanggungjawab yang berbeda, namun harus tetap selaras guna menunjang keberhasilan implementasi. Terakhir, partisipasi kelompok sasaran erat kaitannya dengan tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur. Adanya partisipasi tersebut dapat mendukung keberhasilan implementasi. Sementara determinan dan indikator dari implementasi kebijakan publik yang dapat mempengaruhi

keberhasilan dari implementasi kebijakan adalah berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya.

Sebagaimana pada pemaparan di atas, dan hasil observasi dan juga wawancara di lapangan, peneliti memberikan tambahan determinasi yang mempengaruhi ketiga dimensi implementasi kebijakan Hamdi. Jadi selain kelima determinasi yang sudah ada, peneliti menambahkan satu lagi yaitu determinan kolaborasi. Dimana kolaborasi ini merupakan bagian yang menurut peneliti dapat mendukung implementasi suatu kebijakan. Terlebih lagi kolaborasi ini dapat diartikan bahwa diperlukannya kolaborasi berbagai pihak, selain dari pemerintahan setempat dengan berbagai OPD dan kedinasan yang tersedia, kemudian masyarakat penerima manfaat program juga perlu ditambahkan juga partisipasi dari pihak swasta dan individual/komunitas yang mendukung implementasi kebijakan penurunan stunting di kota Depok. Dalam hal ini peneliti hanya menambahkan satu indikator dalam determinan implementasi Hamdi. Dimana yang awalnya terdiri dari substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, sumber daya, interaksi jejaring kerja, dan partisipasi kelompok sasaran, dan juga **kolaborasi**. Sebagaimana telah peneliti jelaskan di atas, dimana kolaborasi menjadi point indikator yang mendukung pencapaian tujuan implementasi kebijakan penurunan stunting di kota Depok. Berdasarkan dengan observasi di lapangan dan juga pendapat para informan dimana kolaborasi dapat menjadi kunci keberhasilan pemerintah kota Depok dalam mencapai percepatan penurunan stunting di kota Depok mencapai target yang melebihi target nasional ataupun RJPMD kota Depok tahun 2021-2026.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat peneliti sampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang berlandaskan kepada kebijakan Per BKKBN No.12 tahun 2021 tentang RANPASTI di Kota Depok dan Perwali kota Depok No.99 tentang percepatan penurunan stunting di kota Depok sudah berjalan efektif. Dimana dalam hal produktivitas pencapaian target sasaran pada tahun 2023 sebesar 2,43% dengan jumlah balita 2512 balita. Berdasarkan nilai batas untuk kesehatan masyarakat menurut WHO (2019) prevalensi balita wasting di kota Depok yaitu 2,43% dan ini termasuk kategori sangat rendah. Hasil tersebut telah melebihi dari target RJPMD kota Depok 2024 adalah 7%.
2. Determinan dalam implementasi kebijakan untuk percepatan penanganan stunting di Kota Depok Provinsi Jawa Barat berdasarkan perspektif dimensi-dimensi model implementasi kebijakan sebagai berikut:
 - a) Substansi kebijakan; implementasi kebijakan didukung adanya petunjuk teknis operasional bagi pelaksanaan berbagai tahapan untuk percepatan penanganan stunting di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
 - b) Perilaku tugas pelaksana; implementasi kebijakan didukung adanya keterlibatan fasilitator di luar pemerintahan, adanya pengawasan berjenjang dan adanya teknologi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan penilaian kinerja yang dapat mendukung implementasi untuk percepatan penanganan stunting di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
 - c) Interaksi jejaring kerja; implementasi kebijakan didukung oleh adanya kelembagaan melalui Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - d) Partisipasi kelompok sasaran; implementasi kebijakan didukung oleh TPK yang terdiri dari kader posyandu, kader gizi dan PKK, ditambah keterlibatan aktif masyarakat sekitar keluarga stunting yang mendukung percepatan penurunan stunting di kota Depok.
 - e) Sumber daya; implementasi kebijakan mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai kedinasan di Pemerintahan kota Depok dan juga adanya partisipasi dan kolaborasi bersama

pihak di luar pemerintahan. Selain itu dengan aplikasi e-PPGBM sebagai tools penilaian indikator percepatan penurunan stunting di kota Depok Jawa Barat.

3. Konsep model percepatan penanganan stunting yang sesuai di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, menurut implementasi kebijakan Hamdi tersebut, peneliti hanya menambahkan satu indikator dalam determinan implementasi Hamdi. Dimana yang awalnya terdiri dari substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, sumber daya, interaksi jejaring kerja, dan partisipasi kelompok sasaran, peneliti tambahkan indikator kolaborasi sebagai pendukung pencapaian tujuan implementasi percepatan penurunan stunting di kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F., Khomsan, A., & Mauludyani, A. 2014. Masalah dan Solusi Stunting Akibat Kurang Gizi di Wilayah Pedesaan, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Arif, N. 2009. Panduan Ibu Cerdas ASI dan Tumbuh Kembang Bayi. MedPress Jakarta.
- Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta:Putra Grafika.
- Carmichael T dan Cunningham. N. 2017. Theoretical Data Collection and Data Analysis with Gerunds in Constructivist Grounded Theory Study, Electronic Journal of Business Research Methods, 15(2)
- Corbin & Staruss. 1990. Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques, London: Sage Publication.
- David Edson, 1953, The Political Analysis System: An Inquiry State of Political Science, New York: Knop Inc
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2018. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi. UGM press..
- Edwards III. 1980. Public Policy Implementing, Washington DC:Congressional Quarterly Press. pp.148
- Gafar, T. F., Zamhasari, Jamil. 2018, Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayatullah, S. 2000. Pendidikan Kewargaan Demokrasi HAM & Masyarakat Madani, cet 1, IAIN Jakarta Press.
- Kemiskinan, T.N.P.P. 2020. 100 kabupaten/Kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting). Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kurniawan, T. 2007, Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 7.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public. Policy, New York: HarperCollins.
- Meter & Horn. 1975. A Model of the policy Implementation
- Miles, Mathew, Huberman Michael. 1984. Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methode, London: Sage Publications.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintah Baru).Jilid 1-2 Rineka Cipta. Jakarta
- Noor, J. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. 2004. Kebijakan publik. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nurmi Chatim, 2006, Hukum Tata Negara, Pekanbaru: Penerbit Cendikia Insani.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2013. Diakses: 14 Agustus 2019, dari <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Riskesdas%202013.pdf>
- Sedarmayanti.2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sinurat, Marja & Panjaitan. 2017. Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Soemendar. 1985. Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan, Jakarta: seminar IIP
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Ghalia Indonesia, Bogor.

- Sunyoto. 2015. *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS
- Supriasa, ISN. 2012. *Penilaian Status Gizi*, EGC, Jakarta.
- Supriyanto Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: CV Media Berlian.
- Suradinata, E. 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi Era Globalisasi*, Bandung: Penerbit CV. Ramadhan.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Taliziduhu Ndraha. 2000. *Ilmu Pemerintahan (Jilid I)*, Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD.
- Thoha, M. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, Kasman. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Corynanta.I. 2012. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transportasi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Uang Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830>
- Chávez-Zárate, A., Maguiña, J. L., Quichiz-Lara, A. D., Zapata-Fajardo, P. E., & Mayta-Tristán, P. (2019). Relationship between stunting in children 6 to 36 months of age and maternal employment status in Peru: A sub-analysis of the Peruvian Demographic and Health Survey. *PloS one*, 14(4), e0212164. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212164>
- Diansari, R. E. 2016. *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta. Retrieved from <http://repository.upy.ac.id/878/>
- F. D. Bella. N. A. Fajar, and M. Misnaniarti. 2020. Hubungan pola asuh dengan kejadian stunting balita dari keluarga miskin di Kota Palembang," *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, vol. 8, no. 1, pp. 31-39, Feb. 2020. <https://doi.org/10.14710/jgi.8.1.31-39>
- Elnadif, Elmanssury. 2020. Prevalence of malnutrition among under-five children in Al-Nohoud province Western Kordufan, Sudan. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*. 9. 352. [10.11591/ijphs.v9i4.20520](https://doi.org/10.11591/ijphs.v9i4.20520).
- Gunasari, Dwi sekar. 2016. *Hubungan Stunting Dengan Tingkat Kecerdasan Intelektual (Intelligence Quotient - Iq) Pada Anak Baru Masuk Sekolah Dasar Di Kecamatan Nanggalo KotaPadang*. Padang: FK UNAND